

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

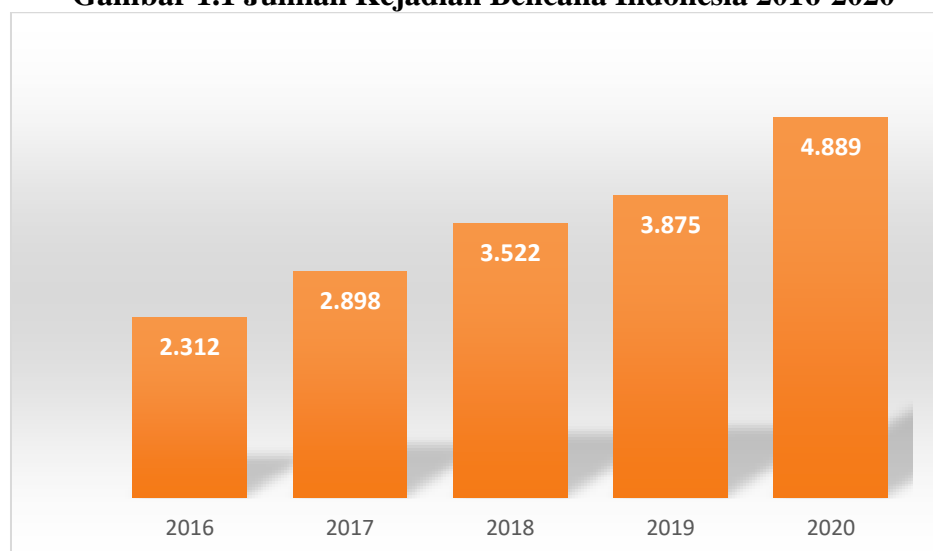
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangat beragam, mulai dari wilayah dengan dataran tinggi, dataran rendah, maupun wilayah yang memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab Indonesia memiliki potensi bencana hidrometeorologi tinggi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim (Susanti et al., 2017:50), sedangkan bencana sendiri dapat diartikan sebagai proses alam maupun non-alam yang sulit diprediksi dan terjadi secara tiba-tiba serta dapat memakan korban jiwa, kehilangan harta bahkan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Tingginya risiko bencana tersebut karena Indonesia dilewati jalur *ring of fire* yang merupakan jalur rangkaian gunung aktif dunia. Selain itu, adanya pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia (Arifianti, 2011:11).

Ketiga lempeng tektonik tersebut dapat bergerak aktif dan saling berbenturan yang mengakibatkan terjadinya bencana sehingga bencana erupsi gunung api, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami sering terjadi di Indonesia. Pada dasarnya bencana memiliki tiga kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Selain bencana alam yang telah disebutkan di atas, beberapa bencana non-alam dan bencana sosial juga sering terjadi di Indonesia. Bencana non alam yang sering terjadi seperti kebakaran hutan

maupun lahan yang disebabkan manusia, kecelakaan industri, dan pencemaran lingkungan, sedangkan bencana sosial seperti konflik sosial dan terorisme. Kondisi tersebut membuat negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 3 kategori bencana tersebut (Rahman, 2015:2).

Bencana alam sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang sulit terprediksi dan terjadi baik secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung perlahan di mana pun dan kapan pun (Puri & Khaerani, 2018:52). Namun sebagai suatu fenomena, bencana tidak dapat dihindari begitu saja oleh manusia. Di Indonesia sendiri ketidaktertiban dan tidak tepatnya tata guna lahan telah mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Hal tersebut juga menjadi faktor kejadian bencana di Indonesia dari tahun ke tahun angkanya selalu naik dan bertambah. Berikut ini adalah Gambar 1.1 tentang jumlah kejadian bencana Indonesia tahun 2015-2020.

Gambar 1.1 Jumlah Kejadian Bencana Indonesia 2016-2020

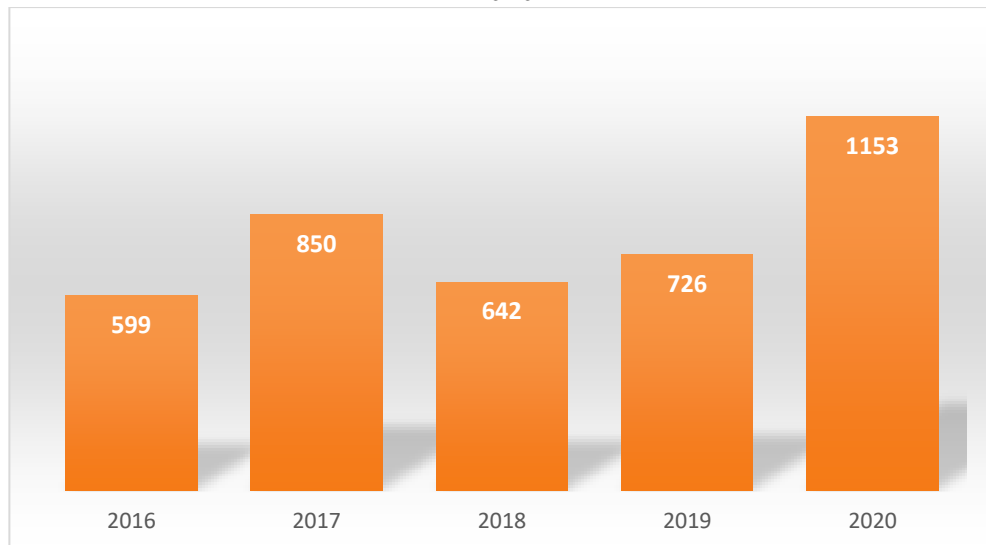


Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB (<https://dibi.bnpb.go.id/>), (2016-2020)

Dari Gambar 1.1, jumlah bencana dari tahun 2016-2020 mencapai 17.496 kejadian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data juga menunjukkan sejak tahun 2016 hingga 2020 jumlah kejadian bencana selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 meningkat hingga 586 bencana menjadi 2.898 kejadian di tahun 2017. Begitu pula pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan dan menjadi 3.522 kejadian pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah kejadian sebanyak 4.889 kejadian. Kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana tersebut mencapai Rp 22,8 triliun per tahunnya.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 bencana alam yang mendominasi adalah banjir, puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung, dan karhutla. Tetapi berdasarkan UNISDR (*United Nations International Strategy for Disaster Reduction*) bencana alam tanah longsor menduduki peringkat pertama dan menjadi bencana paling merugikan dan mematikan (Akhirianto, 2017:33). Sebagai suatu fenomena alam, tanah longsor terjadi karena kondisi geologi, curah hujan yang tinggi, dan pemanfaatan lahan pada lereng yang tidak berwawasan lingkungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bencana tanah longsor di Indonesia terus meningkat dengan persebaran titik kejadian bencana yang semakin luas (Arifianti, 2011:17; Irwandi, 2018:40). Berikut Gambar 1.2 mengenai jumlah kejadian bencana tanah longsor Indonesia tahun 2016-2020.

Gambar 1.2 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor Indonesia 2016-2020



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB (<https://dibi.bnpb.go.id/>), (2016-2020)

Dari Gambar 1.2, jumlah kejadian bencana tanah longsor sepanjang 2016 hingga 2020 menunjukkan angka yang tinggi, pada tahun 2016 terdapat 599 kejadian dan mengalami kenaikan menjadi 850 kejadian pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2018 terjadi penurunan dari kejadian tahun 2017 dan menjadi 642 kejadian. Namun sayangnya, pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali dari 642 kejadian pada tahun 2018 menjadi 726 kejadian pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 1.153 kejadian. Total kejadian bencana tanah longsor dalam kurun waktu 5 tahun tersebut mencapai 3.970 kejadian atau 22,6% dari total kejadian bencana alam di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tanah longsor merupakan bencana yang bersifat lokal yang tersebar di seluruh daerah. Kajian BNPB tahun 2019 menyebutkan 247 kabupaten/kota dan 40,9 juta

penduduk Indonesia terpapar bahaya tanah longsor sedang hingga tinggi. Hal tersebut karena pergerakan 3 (tiga) lempeng tektonik yang membentuk jalur gunung api di Indonesia. Keberadaan jalur gunung api tersebut membuat beberapa wilayah Indonesia adalah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan terjal maupun landai yang menyebabkan tingginya potensi tanah longsor (Arifianti, 2011:1). Beberapa wilayah yang sering dilanda tanah longsor seperti provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur (Irwandi, 2018).

Sebagai salah satu provinsi yang kerap dilanda tanah longsor, Jawa Tengah memiliki kondisi wilayah berupa dataran tinggi dan perbukitan. Tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah juga cukup bervariasi, yaitu 0-2% sebesar 38%; 2-15% sebesar 31%; 15-40% sebesar 19%, sisanya memiliki kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Selain itu, curah hujan di beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah berkisar antara 151-200 mm/hari (kategori tinggi). Tingginya curah hujan disebabkan oleh kondisi muka laut yang hangat dan adanya daerah yang memiliki tekanan rendah di bagian selatan Jawa Tengah. Beberapa kondisi tersebut menjadi faktor tingginya tingkat risiko tanah longsor di Jawa Tengah dengan jumlah titik lokasi rentan longsor sebanyak 327 lokasi dari 918 lokasi yang tersebar di Indonesia (Isnaini, 2019:145).

Kondisi di atas menyebabkan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat kejadian bencana tanah longsor tertinggi. Kejadian tanah longsor di Jawa Tengah terhitung sejak 2015-2020 mencapai 1.540 kejadian yang

mengakibatkan 156 korban meninggal, 18 hilang, 190 luka-luka, serta menyebabkan kerusakan rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas pendidikan. Untuk memberikan gambaran mengenai kejadian tanah longsor yang terjadi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 6 tahun, dapat dilihat dalam Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Kejadian Bencana Tanah Longsor Beserta Dampaknya di Jawa Tengah 2015-2020

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka	Rumah rusak	Fasilitas umum rusak
2015	167	12	1	22	467	21
2016	250	69	10	38	798	25
2017	489	27	0	48	1470	106
2018	161	22	6	36	589	9
2019	295	9	1	24	687	39
2020	178	17	0	22	618	27
Total	1540	156	18	190	4629	227

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB (<https://gis.bnpb.go.id/>), 2015-2020

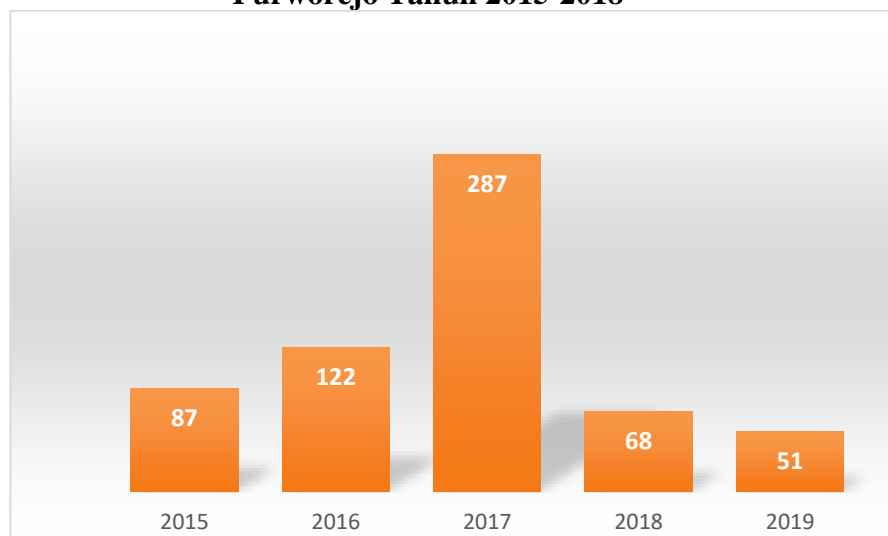
Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kejadian tanah longsor di Jawa Tengah periode 2015 hingga 2020 sangat fluktuatif atau berubah-ubah setiap tahunnya. Namun dalam 6 tahun tersebut, Jawa Tengah selalu menduduki peringkat pertama dengan total kejadian tanah longsor terbanyak dari 34 provinsi lainnya (Prastika, 2020:182).

Salah satu Kabupaten yang sering terkena bencana tanah longsor di Jawa Tengah adalah Kabupaten Purworejo karena sebanyak 272 atau 52% dari total 521 desa/kelurahan rawan terhadap bencana tanah longsor (BPBD Kabupaten Purworejo, 2020). Kabupaten Purworejo juga menduduki urutan ke-106 Indeks

Risiko Bencana Tanah Longsor (2018) dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan skor 24.0 (kelas risiko tinggi). Tingginya risiko tanah longsor di Purworejo karena wilayah Kabupaten Purworejo didominasi oleh pegunungan dan hanya dua perlima daerahnya adalah dataran. Kemiringan wilayah Purworejo yang beragam menjadi pemicu tanah longsor serta curah hujan yang relatif tinggi mencapai 620-3.720 mm/tahun juga sebagai penyebab sebagian wilayah Purworejo rentan bencana tanah longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa bencana tanah longsor merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Purworejo dan menimbulkan kerugian yang cukup besar serta mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Dari tahun 2015-2019 jumlah titik kejadian bencana tanah longsor di Purworejo mencapai 615 kejadian. Data mengenai jumlah titik kejadian bencana tanah longsor Purworejo tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah.

Gambar 1.3 Jumlah Titik Kejadian Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018



Sumber: BPBD Kab. Purworejo, 2015-2019.

Dari data yang pada Gambar 1.2, kejadian bencana tanah longsor di Purworejo sangat fluktuatif dengan kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan total kejadian mencapai 287 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 3 luka ringan, 1.154 menjadi pengungsi dan kerugian mencapai 1,1 Miliar.

Perubahan iklim dan curah hujan yang tinggi serta berkepanjangan baru-baru ini mempengaruhi terjadinya bencana tanah longsor. Seiring banyaknya kejadian tanah longsor tentunya telah merusak lingkungan, menyebabkan kerugian harta benda bahkan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu peningkatan dan optimalisasi pengendalian serta penanggulangan risiko bencana (Adiyoso, 2018). Sebagai daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memprioritaskan program penanggulangan bencana (Sari & Yuniningsih, 2020:2). Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan hak, perlindungan masyarakat, pengurangan dan pemanduan risiko bencana, serta pengalokasian dana. Penanggulangan bencana juga merupakan bentuk perlindungan serta pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan hanya karena sebuah kewajiban pemerintah saja, namun penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab

bersama seluruh elemen masyarakat. Sesuai Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2007 masyarakat memiliki kewajiban untuk saling menjaga kehidupan bermasyarakat, menjaga lingkungan tempat tinggalnya, serta ikut dalam kegiatan dan program yang disusun pemerintah mengenai penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Purworejo, BPBD Kabupaten Purworejo yang memiliki peran dalam menciptakan rasa aman masyarakat dari ancaman bencana melakukan upaya penanggulangan bencana dengan membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) pada Desa/Kelurahan yang memiliki kerentanan terhadap suatu bencana. Dengan dibentuknya Destana, desa diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta dapat melakukan pemulihan dari dampak terjadinya bencana. Sesuai dengan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bahwa Destana merupakan forum penanggulangan bencana berbasis komunitas masyarakat yang dibentuk agar masyarakat dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana.

Pembentukan Destana merupakan bentuk dari penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau upaya masyarakat dalam pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan secara terorganisir (Prastika, 2020:183). Pembentukan Destana ini perlu dilakukan pada desa/kelurahan yang memiliki kerentanan terhadap bencana termasuk bencana tanah longsor karena tanah longsor merupakan bencana yang memberikan dampak langsung kepada tatanan

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan Destana diharapkan desa yang memiliki kerentanan terhadap tanah longsor dapat melakukan program atau kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang dilakukan Uganda, sebagai negara dengan risiko tanah longsor sangat tinggi memberlakukan kebijakan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang dilakukan dengan penanaman pohon (Martens dalam Prastika, 2020:182). Sebagaimana yang dilakukan masyarakat Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak, yang menanam mangrove di kawasan pantai untuk mencegah bencana abrasi (Purnaweni et al., 2017).

Di Kabupaten Purworejo sebanyak 58 Destana telah diresmikan (Radar Purworejo, 2017), 27 di antaranya meliputi Destana dengan risiko tanah longsor dan sisanya risiko banjir dan tsunami. Salah satu Destana dengan risiko tanah longsor adalah Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing. Destana Jelok ini didirikan pada tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Desa 360/BA/VII/2016, dilatarbelakangi oleh kejadian tanah longsor yang terjadi pada tahun 2016. Berikut Gambar 1.4 terkait bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Jelok pada tahun 2016.

Gambar 1.4 Bencana Tanah Longsor di Desa Jelok Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Jelok, 2016.

Dari Gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwa kejadian bencana tanah longsor yang melanda Desa Jelok menyebabkan timbunan tanah di sekitar pemukiman warga. Adapun dampak lain yang terjadi antara lain 4 korban meninggal dunia, 7 luka-luka, dan 11 rumah hanyut. Selain itu, kondisi morfologi Desa Jelok merupakan perbukitan dengan ketinggian mencapai 200-300 meter di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan lereng 30° sampai 50° sehingga saat curah hujan tinggi potensi terjadinya tanah longsor tinggi.

Kejadian tanah longsor yang pernah terjadi di Desa Jelok tentunya memberikan dampak serta kerentanan baru bagi masyarakat. Namun, masyarakat juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dalam waktu yang cepat sehingga peran Destana sebagai komunitas penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk dapat meningkatkan potensinya dalam bidang kebencanaan (Wulandari dalam Yaneri, 2020:15). Dengan ini Destana Jelok melakukan upaya penanggulangan bencana melalui pelaksanaan manajemen bencana. Manajemen bencana sendiri merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang meliputi sebelum, saat, dan setelah terjadinya suatu bencana yang

memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh kejadian bencana (Faturahman, 2017:195).

Suwaryo dan Yuwono dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor (2017) mengungkapkan bahwa selama ini manajemen bencana belum dijadikan prioritas dan hanya diaplikasikan ketika bencana terjadi. Sebagai negara yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi sudah semestinya seluruh kalangan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat memahami manajemen bencana. Oleh karena itu, dengan pembentukan Destana di Desa Jelok tokoh pemuda dan anggota FPRB Destana Jelok berupaya dalam meningkatkan potensinya dalam manajemen bencana dengan ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Purworejo.

Isnaini (2019) menjelaskan bahwa risiko dan dampak tanah longsor dapat diminimalisir melalui pelaksanaan manajemen bencana yang baik, berkelanjutan serta informasi yang tepat dan akurat. Adapun dalam pemulihan pasca bencana merupakan tahapan paling penting dalam manajemen bencana. Pada tahap pemulihan pasca bencana ini merupakan tahap ketika suatu negara, masyarakat, keluarga, maupun individu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali apa yang telah rusak maupun hilang akibat bencana (Bevaola dalam Nurqurbani, 2021:35). Setelah kejadian bencana yang melanda Desa Jelok, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Jelok melakukan pemulihan pasca bencana melalui kegiatan konservasi lingkungan serta pendampingan teknis dari BPBD. Dengan upaya tersebut, Desa Jelok berhasil memperbaiki

sarana prasarana serta perlahan-lahan kondisi ekonomi masyarakat Desa Jelok dapat pulih dan bergerak kembali. Oleh karena itu, Destana Jelok dijadikan sebagai contoh Destana yang telah berhasil memulihkan kondisi sosial psikologis dan ekonomi masyarakat oleh kelompok Destana lain yang ada di Kabupaten Purworejo.

Melihat permasalahan terkait bencana dan dampak tanah longsor yang semakin meningkat dengan titik kejadian bencana yang semakin luas sehingga sudah semestinya pelaksanaan pemulihan pasca bencana dimaksimalkan untuk menghindari ancaman dan dampak bencana di masa mendatang. Pada dasarnya pelaksanaan manajemen yang baik akan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan sebuah organisasi yang mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memahami lebih dalam terkait manajemen bencana tanah longsor di Destana Jelok. Dengan demikian, penelitian mengenai manajemen bencana sangat menarik dan penting untuk dilakukan, sebagai salah satu upaya untuk menghindari dan mengurangi risiko serta dampak bencana yang sulit diprediksi. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai manajemen bencana tanah longsor khususnya pada tahap pasca bencana dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bencana tanah longsor sebagai bencana yang paling mematikan dan Indonesia memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi terhadap bencana tanah longsor.

Namun, kejadian tanah longsor semakin meningkat hampir setiap tahunnya terutama saat memasuki musim penghujan. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah kejadian bencana tanah longsor di Indonesia yang tertulis pada Data Informasi Bencana Indonesia mencapai 3.970 kejadian atau 22,6% dari total kejadian bencana alam di Indonesia. Kejadian bencana tanah longsor yang menimpa masyarakat Desa Jelok, Kabupaten Purworejo tersebut memberikan dampak buruk serta kerentanan baru bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu juga meninggalkan dampak sosial dan psikologis. Manajemen bencana sebagai salah satu bentuk kegiatan atau proses untuk meminimalisir adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh kejadian bencana belum dijadikan prioritas. Selama ini pengaplikasian manajemen bencana hanya dilakukan ketika bencana terjadi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen bencana pada Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo dalam keberhasilan pemulihan pasca bencana tanah longsor?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung keberhasilan Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana tanah longsor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis manajemen bencana pada Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo dalam keberhasilan pemulihan pasca bencana tanah longsor.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung keberhasilan Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana tanah longsor.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam pengembangan pengetahuan dan dijadikan referensi untuk penelitian mendatang mengenai manajemen pemulihan pasca bencana bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

1.5.2 Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pengalaman untuk melatih kemampuan dalam memahami dan mempelajari bagaimana manajemen bencana tanah longsor dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Penulis juga diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai manajemen bencana yang didapatkan dari perkuliahan.

b. Pemerintah atau Lembaga/Organisasi Swasta

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan masukan serta tolok ukur Badan Penanggulangan Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

dalam melakukan manajemen pemulihan pasca bencana sebagai upaya penanggulangan bencana tanah longsor khususnya pada daerah yang memiliki risiko atau rawan terhadap tanah longsor.

c. Bagi Penulis Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan, informasi rujukan serta sebagai perbandingan dalam penelitian yang akan datang agar dapat dikembangkan dan dikaji lebih luas untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan lengkap.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan judul penelitian terdahulu yang sama dengan judul yang akan diangkat oleh peneliti. Dengan penelitian terdahulu yang diacu oleh peneliti digunakan untuk dijadikan referensi dan memperkaya bahan kajian untuk penelitian. Penelitian yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan manajemen bencana tanah longsor.

Isnaini dalam penelitiannya tahun 2019 membahas mengenai penyebab tanah longsor di Jawa Tengah yang disebabkan oleh curah hujan mencapai 151-200 mm/hari (kategori tinggi) dan kondisi topografi Jawa Tengah dengan kemiringan besar serta penggunaan lahan yang didominasi oleh pertanian,

perkebunan tanpa adanya sistem pembuangan air di bagian atas bukit. Dengan kondisi tersebut tentunya tanah longsor memberikan dampak korban, rusaknya rumah dan fasilitas umum, dan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah. Sebagai bentuk perlindungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk meminimalisir kerugian dan risiko bencana (2019:143–160). Topik dalam penelitian ini sama dengan topik yang diangkat oleh peneliti, yaitu tanah longsor. Namun, dalam penelitian ini hanya membahas mengenai penyebab, dampak, dan pengelolaan tanah longsor.

Terkait dengan mitigasi bencana tanah longsor, artikel yang ditulis oleh Prastowo dan Wahyuningsih (2020) membahas mengenai implementasi mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2006. Hasil menunjukkan bahwa dalam mitigasi bencana di Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh 5 instansi, yaitu BPBD, DPUPR, DINKES, DISHUB, DLH. Masing-masing instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai Permendagri No 33 tahun 2006. Pencapaian pelaksanaan pada masing-masing instansi paling tinggi diperoleh oleh BPBD dengan persentase sebesar 70%, DPUPR 56%, DLH 36%, dan paling rendah ada pada DISHUB 23% (2020:1–12). Topik dalam penelitian ini sama dengan topik yang diangkat oleh peneliti, hanya saja peneliti akan membahas mengenai manajemen bencana.

Adapun Puri dan Khaerani dalam penelitiannya membahas mengenai mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Purworejo, yaitu dengan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural meliputi penyediaan EWS tanah longsor, penyediaan data, pemetaan, pemasangan *bronjong* dan rambu evakuasi. Adapun mitigasi non struktural dilakukan dengan pelatihan, pembentukan komunitas penanggulangan bencana, sosialisasi, dan simulasi EWS tanah longsor. Terkait dengan faktor pendorong mitigasi bencana tanah longsor, yaitu kesesuaian visi misi, kerjasama antar *stakeholder*, anggaran dana memadai, komitmen BPBD, sarana prasarana yang lengkap, dan sebagainya, sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah pencapaian visi misi belum maksimal, belum terdapat dokumen rencana kontijensi, rambu evakuasi masih sementara, dan rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat (2017:51–65). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sama, yaitu mengenai bencana tanah longsor. Namun, dalam penelitian ini fokus pada strategi mitigasi bencana.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Yuniningsih, membahas mengenai manajemen risiko bencana pada Destana di BPBD Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian dijelaskan bahwa pelaksanaan manajemen risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Purworejo belum maksimal dan masih ditemukan kendala dan penghambat dalam beberapa kegiatan, seperti pada perencanaan, pengurangan risiko bencana, pencegahan, analisis risiko bencana, serta

pelatihan dan pendidikan. Adapun faktor yang menghambat terdiri dari kurangnya pelatihan serta pendidikan dan sistem komunikasi dan peringatan dini yang tidak memadai (2020:1–16). Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tetapi dalam penelitian ini mengkaji terkait manajemen risiko, sedangkan peneliti akan mengkaji terkait dengan manajemen bencana.

Flentje dan Chowdhury dalam penelitiannya '*Resilience and Sustainability in the Management of Landslides*' (2018), membahas mengenai pengelolaan tanah longsor perkotaan yang telah dikembangkan di wilayah Wollongong di NSW, Australia, dan Hong Kong. Dalam pendekatan berkelanjutan dan tangguh dalam pengelolaan tanah longsor telah berkembang dengan maju. Selain itu, pendekatan konsekuensi-bahaya juga dianggap berguna, meski kerentanan dan lokasi bahaya dalam literatur mengenai pengelolaan tanah longsor di Hong Kong kurang disebutkan (2018:3–14). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sama dengan peneliti, namun lokus dalam penelitian ini pada daerah perkotaan sehingga berbeda dengan lokus peneliti yang mengambil lokus di Desa Jelok.

Berbeda dari penelitian di atas, Salehin, Hossain, Nayeem, dan Hassan dalam penelitiannya yang dilakukan di Bangladesh membahas konstitusi yang menangani manajemen bencana dengan memastikan tata kelola bencana dan tata kelola adaptif. Hasil penelitian menjelaskan Pemerintah Bangladesh telah mengesahkan Undang-Undang Manajemen Bencana pada tahun 2012, di mana peran dan tanggung jawab berbagai lembaga ditentukan pada saat

terjadinya bencana. Oleh karena itu, pasal-pasal yang diubah secara khusus dapat dimasukkan dengan fokus pada hak-hak orang yang terkena dampak bencana saja. Masyarakat miskin, perempuan kepala keluarga, janda dan komunitas terlantar lainnya harus diberi prioritas tertinggi. Pemerintah Bangladesh harus memastikan manajemen risiko bencana terpadu dan strategi adaptasi untuk wilayah yang paling rentan di negara tersebut seperti jalur perbukitan Chittagong yang lemah, Bhola, Hatia dan distrik pesisir lainnya (2020:57–69). Fokus dalam penelitian ini terkait manajemen bencana sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun, dalam penelitian ini lebih mengkaji terkait konstitusi dari manajemen bencana.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai dasar-dasar tentang sistem manajemen bencana berbasis IoT oleh Ray, Mukherjee, dan Lei Shu (2017). Hasil penelitian menjelaskan bahwa adopsi teknik baru dapat mengurangi kemungkinan kehilangan nyawa manusia serta kerusakan infrastruktur skala besar karena bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan menerapkan analisis data dengan alat kecerdasan buatan, sistem manajemen bencana berkemampuan IoT digunakan untuk peringatan dini tentang kecelakaan tersebut. Besarnya dampak yang diakibatkan suatu bencana sehingga sistem manajemen bencana berkemampuan IoT dapat diterapkan untuk menemukan korban dan kemungkinan operasi penyelamatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti akan membahas terkait

dengan manajemen bencana dalam Desa Tangguh Bencana, sedangkan pada penelitian membahas manajemen bencana berbasis IoT.

Adapun Faturahman dalam penelitiannya berjudul ‘Reformasi Administrasi dalam Manajemen Bencana’, dijelaskan bahwa Kabupaten Pacitan perlu mengubah paradigma *mindset* dan *culture set*, dari responsif saat dan pasca bencana ke upaya mitigasi dan pencegahan bencana. Tujuannya untuk memperbaiki pelayanan publik mengingat Kab. Pacitan rentan tsunami, banjir, dan tanah longsor. *Local governance* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta memiliki kaitan sistematis dan sinergis agar keberlanjutan serta keberlangsungan manajemen bencana efektif perlu kepedulian, kesadaran, partisipasi, komitmen, dan kerjasama kolektif (2017:185–201). Penelitian ini memiliki fokus yang sama terkait dengan manajemen bencana. Namun, penelitian ini mengkaji bencana secara keseluruhan dan tidak difokuskan pada satu bencana.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, Akhirianto (2017) dalam penelitiannya membahas mengenai konsep desain pengurangan risiko bencana longsor berbasis komunitas. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan salah satu upaya yang dapat mendorong dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal, salah satunya dapat dilakukan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana. Dari pengembangan tersebut dapat dilakukan pengurangan ancaman dan risiko bencana serta kerentanan masyarakat sehingga dapat

meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengurangan risiko berbasis komunitas dapat lebih efektif jika terdapat keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta bantuan dari *stakeholder* terkait. Penelitian ini sejalan dengan peneliti yang membahas terkait pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Namun dalam penelitian ini tidak membahas mengenai manajemen bencana.

Zaharia dan Ariffin (2013) dalam artikelnya membahas peran organisasi berbasis komunitas (CBO) dalam menangani kerentanan masyarakat yang terdampak bencana banjir. CBO memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola bencana untuk memastikan anggota masyarakat siap menghadapi segala kemungkinan dan mengurangi kerentanan mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa kaum miskin perkotaan adalah kelompok yang paling rentan dalam sebagian besar kejadian bencana banjir dan pengalaman yang mereka alami telah membentuk cara mereka menjalani hidup. Kerentanan kelompok tersebut tentunya dapat merugikan diri sendiri karena mereka secara sadar memilih tinggal pada area berbahaya. Namun dengan keterlibatan CBO, komunikasi dan berbagi pengetahuan dengan anggota masyarakat serta bimbingan dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dapat digunakan sebagai upaya pengurangan atau mengatasi kerentanan masyarakat terhadap ancaman atau risiko bencana. Permasalahan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti, yaitu terkait bencana banjir.

1.6.2 Administrasi Publik

Perubahan istilah administrasi negara menjadi administrasi publik membuat makna administrasi menjadi semakin luas. Pada administrasi negara menganggap bahwa administrasi hanya ditujukan untuk negara saja. Namun, dalam administrasi publik istilah administrasi tidak hanya melayani negara melainkan masyarakat dan swasta (Revida et al., 2020:1). Kata administrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani *ad* dan *ministrare* yang berarti melayani. Siagian (dalam Revida et al., 2020:2) menjelaskan bahwa administrasi merupakan kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berdasar pada rasionalitas tertentu. Publik sendiri memiliki arti umum, negara, masyarakat atau orang banyak. Syafiie (2010) memaknai publik sebagai sejumlah masyarakat yang memiliki kesamaan pikiran, perasaan, impian, sikap, dan tindakan baik dan benar yang mengacu pada nilai dan norma yang dianut.

Administrasi publik merupakan alih bahasa dari istilah *public administration* yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris (Syafri, 2012:16). Pengertian mengenai administrasi publik sangat beragam dan banyak sekali ahli dunia yang memberikan definisi. Pasolong (dalam Revida et al., 2020:3) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian proses kerjasama antara sekelompok orang dan/atau lembaga untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan publik yang efektif dan efisien. Maksud tersebut dapat dipahami bahwa administrasi publik berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada

publik yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun lembaga-lembaga tertentu.

Lebih luas Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Keban, 2014:6) menjelaskan administrasi publik sebagai kerjasama yang dilakukan pada sekelompok lingkungan pemerintah yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melakukan proses politik dan/atau merumuskan kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan pemberian pelayanan kepada publik. Dalam hal ini cara kerja administrasi publik dalam perumusan kebijakan tentunya berbeda dengan swasta, namun memiliki kaitan yang erat dengan kelompok swasta dan individu dalam upaya pemberian pelayanan. Oleh sebab itu, pelaksanaan administrasi publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator, tetapi juga melibatkan swasta dan masyarakat (Revida et al., 2020:2).

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah kerjasama atau koordinasi yang dijalankan oleh sekelompok orang maupun lembaga pemerintah dalam suatu proses guna memberikan pelayanan kepada publik serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan administrasi publik dengan penelitian ini, yaitu manajemen bencana merupakan bagian dari administrasi publik yang menjelaskan bagaimana manajemen dan organisasi atau lembaga dan peralatannya mampu dilibatkan guna mencapai tujuan pemulihan pasca bencana.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah yang berfungsi sebagai *setting* utama dalam organisasi, fokus utama pada fungsi eksekutif, prinsip manajemen sebagai kunci dalam pengembangan kompetensi administratif, dan metode perbandingan sebagai salah satu metode pengembangan pada administrasi publik menurut Woodrow Wilson (dalam Keban, 2014:100). Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam Keban, 2014:92) menyebutkan bahwa fokus dalam manajemen publik pada alat-alat manajerial, teknik-teknik ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan suatu program.

Manajemen publik merupakan salah satu cabang bidang ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan proses menggerakkan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia dalam menjalankan prinsip manajemen terhadap pelayanan kepada publik. Dalam studi manajemen publik meliputi gabungan dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian sumber daya yang ada pada suatu organisasi, keuangan, fisik, informasi serta politik sebagai suatu rangkaian proses pencapaian tujuan organisasi.

Paradigma Manajemen Publik telah mengalami pergeseran mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bermula dari paradigma *Old Public Administration (OPA)* hingga berkembang kemudian menjadi paradigma *New Public Management (NPM)*. Dalam perkembangan tersebut tentunya

banyak terjadi perubahan salah satunya dalam penyebutan *government* menjadi *governance*. Selain itu terdapat istilah baru, yakni *collaborative governance*, sebagai proses pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah yang turut melibatkan pihak ketiga di luar institusi pemerintah, seperti kelompok kepentingan masyarakat atau *Non Governmental Organization (NGO)* (Tilano & Suwitri, 2018). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait manajemen bencana tanah longsor yang dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan juga melibatkan berbagai aktor yang memiliki kapasitas terkait pelaksanaan manajemen bencana. Selanjutnya manajemen bencana juga merupakan bentuk kegiatan menggerakkan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk melaksanakan kegiatan dalam manajemen bencana.

1.6.4 Manajemen Bencana

Manajemen bencana atau *disaster management* sering pula disebut dengan pengelolaan risiko atau manajemen risiko bencana yang memiliki pengertian langkah dan proses menilai kemungkinan terjadinya suatu bencana, besaran bahaya yang akan didapatkan, evaluasi serta bagaimana mengelola bahaya tersebut sejak sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Pada dasarnya manajemen bencana dengan manajemen risiko bencana memiliki konsep yang sama, keduanya mengacu pada bentuk implementasi dari gerakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), yaitu bagaimana risiko, bahaya, dan bencana dikelola untuk mengurangi dampak yang akan terjadi (Adiyoso,

2018:88). UNSPIDER (*United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response*) sendiri menggambarkan manajemen bencana sebagai implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana dan strategi pencegahan potensi bencana, pengurangan kemungkinan bahaya yang terjadi, pengurangan dan pengelolaan risiko, peningkatan *resilient*, dan mengurangi kerugian.

Faturahman (2017:195) menjelaskan manajemen bencana sebagai serangkaian kegiatan atau proses yang meliputi sebelum, saat, dan setelah terjadinya suatu bencana yang memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Lebih lanjut, menurut *University of Wisconsin* (dalam Mulyawati, 2019:36) manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan mengendalikan bencana dan keadaan darurat serta melakukan upaya untuk menghindari dan/atau mengatasi dampak bencana. Manajemen bencana merupakan suatu bentuk usaha dalam membantu masyarakat yang tinggal pada daerah rentan bencana agar dapat menghindari ataupun pulih dari bencana.

Manajemen bencana merupakan bentuk pelayanan bagi publik yang perlu dilaksanakan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah guna mengurangi penderitaan dan kerugian akibat bencana (Faturahman, 2017:195). Tujuan manajemen bencana menurut Adiyoso (2018:73) adalah mengurangi dan/atau menghindari kerugian fisik, ekonomi. Maupun jiwa bagi para penyintas, mengurangi penderitaan korban bencana, memberikan

perlindungan kepada pengungsi, dan mempercepat pemulihan dan/atau pembangunan kembali. Dalam pelaksanaan manajemen bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 terbagi atas 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra-bencana, bencana, dan pasca bencana. Keberhasilan manajemen bencana adalah adanya dukungan dari masyarakat dan instansi yang menjadi leading sektor yaitu, BPBD (Setyawan et al., 2019:29)

Urgensi manajemen bencana, yaitu melaksanakan kegiatan yang konkret guna pengendalian dan penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak negatif dengan menyelamatkan korban, nyawa dan kerugian harta benda secara cepat dan tepat sehingga pemulihan pasca bencana dapat segera dilakukan. Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap bencana alam, menciptakan proses penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, meneguhkan kebijakan yang berbasis kearifan lokal dan peraturan daerah mengenai manajemen bencana. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mengkaji pada tahap pasca bencana karena Destana Jelok dibentuk ketika bencana telah terjadi di tahun 2016.

1.6.5 Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan merupakan upaya untuk mengatasi dan menurunkan bencana pada faktor-faktor yang dapat memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam manajemen pemulihan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan manajemen pemulihan itu sendiri adalah memfungsikan kembali

fungsi lembaga, sarana dan prasarana secara terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun dalam pelaksanaan pemulihan bukan hanya sekadar membangun kembali sarana dan prasarana setiap sektor yang terdampak bencana, tetapi juga harus mencakup kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah yang terkena bencana. Pembangunan sarana dan prasarana juga harus memperhatikan cara-cara yang lebih baik dan aman (*build back better and safer*) untuk menghindari dampak dan/atau kerusakan kembali di masa mendatang (Nurqurbani, 2021:38–39).

Adiyoso (2018:253) menjelaskan dalam proses penyelenggaraan pemulihan pasca bencana terdapat serangkaian kegiatan atau tahap untuk mencapai rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif dan efisien. Kegiatan manajemen pemulihan pasca bencana dilakukan sejak proses analisis dan pengkajian akibat, dampak, serta kebutuhan pasca bencana, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam proses perencanaan tentunya membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada pengkajian kebutuhan dan sesuai dengan rencana pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

1) Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya perbaikan dan pemulihan pada aspek pelayanan publik agar lebih memadai dengan tujuan menormalisasikan aspek-aspek pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Selain itu juga perbaikan tempat tinggal penduduk, fasilitas umum, dan fasilitas

sosial untuk menghidupkan kembali kegiatan perekonomian. Dengan pengembalian fungsi dan fasilitas tersebut layanan publik dapat dilaksanakan seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Prinsip dasar penetapan kebijakan rehabilitasi didasarkan pada Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu:

- a. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai korban, tetapi sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi.
- b. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.
- c. *Early recovery* dilakukan segera oleh *rapid assessment team* setelah bencana terjadi.
- d. Program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat (sesuai dengan Perpres tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

2) Rekonstruksi

Dalam tahap rekonstruksi ini kegiatan dan tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, penegakan hukum dan ketertiban, dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan kembali sarana/prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana pada tingkat pemerintah

maupun masyarakat guna mengembalikan kembali kehidupan bermasyarakat pada kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pada pelaksanaannya, rekonstruksi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif, baik masyarakat yang terdampak secara langsung maupun masyarakat secara umum. Untuk mencapai rekonstruksi yang tepat diperlukan perencanaan yang baik sehingga dapat tepat sasaran, tertib penggunaan dana, serta mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa datang. Adapun sasaran dalam penyelenggaraan rekonstruksi berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah

- a. Tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
- b. Tercapainya kehidupan masyarakat pasca-bencana yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana, yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana.

Berdasarkan penjelasan di atas, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengakomodasikan 3 (tiga) aspek penting, yakni aspek kemanusiaan, aspek pemulihan, dan pembangunan(Nurjanah et al., 2012:76).

Agar proses manajemen pemulihan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dan kalangan masyarakat umum dapat menyelenggarakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tepat waktu, tepat guna, tepat anggaran, dan tepat sasaran. Namun, sebelum menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi diperlukan analisis kebutuhan pasca bencana yang meliputi akibat dan dampak yang ditimbulkan serta kebutuhan yang diperlukan untuk tahap pemulihan pasca bencana. Dalam penelitian ini untuk mengkaji dan memahami manajemen pemulihan pasca bencana akan dilihat dari tahap analisis kebutuhan pasca bencana, proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Manajemen bencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi dan/atau meminimalisir dampak dari bahaya suatu bencana. Bencana tanah longsor sebagai salah satu bencana yang paling merugikan dan mematikan bagi masyarakat terdampak tentunya memberikan kerentanan baru bagi masyarakat sehingga perlunya manajemen bencana tanah longsor untuk meminimalisir dampak buruk yang kemungkinan terjadi. Dalam pelaksanaan manajemen bencana tanah longsor dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pra bencana, bencana, dan pasca bencana serta dengan melihat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan

alat penelitian dan teori yang digunakan maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan manajemen bencana di Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok dalam keberhasilan melaksanakan pemulihan pasca bencana tanah longsor. Dalam menganalisis pelaksanaan manajemen bencana terdapat 3 (tiga) fenomena yang dapat dilihat, yaitu:
 - 1) Analisis kebutuhan pasca bencana
 - 2) Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
 - 3) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Menganalisis faktor pendukung keberhasilan Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana tanah longsor.. Dalam menganalisis faktor pendukung terdapat 3 (tiga) fenomena yang dapat dilihat, yakni:
 - 1) Adanya dukungan manajemen puncak
 - 2) Keterlibatan dan Dukungan Masyarakat
 - 3) Perencanaan program.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses ilmiah untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya untuk sebuah tujuan dan kegiatan tertentu (Sugiyono dalam Hardani et al., 2020:242). Dalam melaksanakan penelitian tentunya diperlukan rancangan penelitian untuk menggambarkan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti meliputi waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan

analisis dari data yang diperoleh. Rancangan penelitian ini sangat penting untuk melihat metode penelitian mana yang lebih tepat untuk digunakan sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diteliti.

Metode penelitian sendiri terbagi atas metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian yang menuntut peneliti banyak menggunakan angka mulai dari pengumpulan, penafsiran, serta penampilan dari hasil data yang diperoleh (Siyoto & Sodik, 2015:17). Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun tulisan dari narasumber atau informan dan pengamatan oleh peneliti (Mantra dalam Siyoto and Sodik, 2015:28). Pengumpulan data dalam kedua metode penelitian ini juga berbeda, dalam penelitian kuantitatif data dapat diperoleh dari survei melalui kuesioner atau melalui eksperimen, sedangkan data dalam penelitian kualitatif didapatkan dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Usman dan Setiady (dalam Faladinta et al., 2015:5) menjelaskan dalam penelitian kualitatif mencoba memahami dan menafsirkan makna peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif deskriptif berusaha mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam

bentuk angka-angka (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk memperoleh gambaran terperinci mengenai keadaan yang diamati.

Penelitian kualitatif tidak membatasi beberapa disiplin ilmu tertentu dan digunakan untuk cakupan yang luas dari berbagai bidang ilmu, di antaranya seperti sosiologi, pendidikan, antropologi, kajian seni, sejarah, budaya, biografi, kesehatan, psikologi, kesusastraan, psikiatri dan yang lainnya (Marshall dan Rosman dalam Gabriela, 1999:4). Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena fenomena yang akan diteliti mengenai pelaksanaan manajemen bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo khususnya di Desa Jelok sebagai upaya pemulihan bencana tanah longsor. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai pelaksanaan manajemen bencana tanah longsor serta faktor pendukung dalam keberhasilan Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo melaksanakan pemulihan pasca bencana tanah longsor.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs dalam penelitian ini adalah lokus atau lokasi penelitian dilakukan. Dalam menentukan lokasi tentunya harus melewati pertimbangan agar sesuai dengan topik yang akan diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengambil lokus di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah manajemen bencana tanah longsor di Desa Tangguh Bencana (Destana). Peneliti masih menemukan fakta bahwa masih jarang sekali ditemukan penelitian terkait

keberhasilan Destana dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis manajemen bencana tanah longsor pada tahap pasca bencana serta faktor pendorong dalam keberhasilan Destana Jelok dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana tanah longsor.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek atau informan merupakan orang pada latar penelitian yang dibutuhkan untuk memberikan informasi akurat mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Selanjutnya subjek penelitian inilah yang nantinya diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Dalam pemilihan subjek peneliti menggunakan teknik *purposive*, informan dipilih sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan data agar peneliti mendapatkan data yang tepat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui manajemen bencana tanah longsor dan faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen bencana pada pemulihan pasca bencana tanah longsor oleh Desa Tangguh Bencana. Subjek yang dibutuhkan harus memahami betul mengenai substansi dalam penelitian ini agar dapat memberikan data sesuai dengan fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini tentunya peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan pada pertimbangan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok Kabupaten Purworejo melaksanakan pemulihan pasca bencana tanah longsor.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Tangguh Bencana Desa Jelok, peneliti menggunakan beberapa jenis data, antara lain :

1. Data Tertulis

Data tertulis adalah data yang berbentuk uraian atau penjelasan tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya.

2. Data Gambar

Data gambar adalah data yang disajikan dalam bentuk gambar, simbol, diagram, peta, dan sebagainya.

3. Data Tabel

Data tabel adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel.

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari ketiga jenis data di atas guna mendapatkan data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data atau dari mana peneliti memperoleh data dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif sendiri data utamanya berupa kata-kata dalam bentuk rekaman dan tindakan yang diamati peneliti terhadap objek, terdapat pula data-data tambahan berupa dokumen, gambar, dan lain-lain menurut Lofland dan Lofland (dalam Hardani et al., 2020:66). Adapun bentuk data dapat berupa perkataan dan tindakan, sumber tertulis, foto maupun statistik. Sumber data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumbernya secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan berupa ucapan atau kata-kata yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan yang berkenaan dengan manajemen bencana tanah longsor dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Jelok.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga atau dari sumber lain seperti laporan, profil, buku pedoman, atau penelitian terdahulu (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari laporan penelitian terdahulu, profil dan dokumen dalam BPBD Kabupaten Purworejo dan Pemerintahan Desa Jelok, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, media pers, dan sumber lainnya yang dapat menunjang penelitian. Data yang diperoleh tentunya berkaitan dengan fokus dalam penelitian, yaitu manajemen bencana tanah longsor dalam Desa Tangguh Bencana.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Melihat dari tujuan sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi berupa fakta tentunya teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling krusial dalam melakukan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat peneliti tentunya akan mendapatkan data sesuai dengan standar yang diinginkan. Teknik pengumpulan data merupakan alat atau instrumen dalam rangka proses pengumpulan keterangan maupun bahan

berupa fakta yang dapat digunakan sebagai data dasar dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara/teknik (Sugiyono, 2012:156). Terdapat banyak sekali teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, namun untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan dapat menggunakan beberapa saja agar data yang didapatkan sesuai dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah tata cara penghimpunan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka antara peneliti dan informan atau narasumber dengan prosedur dan arahan yang telah ditetapkan peneliti. Wawancara dilakukan langsung kepada informan atau narasumber oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa fakta-fakta mendalam di lapangan. Metode wawancara yang digunakan tidak terstruktur, tetapi tetap sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah disepakati. Teknik wawancara ini dipilih agar memberikan informasi yang dibutuhkan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh informan atau narasumber dapat dipertanggungjawabkan.

2. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan/atau pencatatan secara teratur dan logis terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian. Dalam melakukan observasi membutuhkan proses yang

cukup kompleks dengan mengandalkan indera penglihatan dan ingatan peneliti. Observasi yang akan digunakan peneliti adalah observasi non-partisipan karena peneliti hanya sebagai pengamat independen tidak terlibat langsung dengan aktivitas subjek yang diamati. Namun tetap menggunakan observasi terstruktur, pengamatan yang akan dilaksanakan telah disusun secara sistematis mengenai apa yang akan diamati, di mana lokasi subjek yang akan digunakan serta waktu untuk melakukan pengamatan atau observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data ini digunakan karena biaya yang digunakan sedikit serta tidak menyita waktu dan tenaga yang banyak. Namun, terkadang dokumen yang tersedia sudah lama dan jika terdapat kesalahan dalam dokumen tersebut dapat berpengaruh terhadap data yang diperoleh. Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental. Dengan dokumentasi peneliti dapat memperoleh data sekunder yang dapat digunakan dan dimanfaatkan, tentunya tetap sesuai dengan fokus penelitian berupa arsip-arsip dan laporan pada pemerintah terkait.

1.8.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Menurut Patton (dalam Siyoto & Sodik, 2015:103) analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu

pola, kategori serta uraian dasar sehingga analisis data merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini, data yang telah didapatkan melalui wawancara dan observasi akan dikelompokkan menurut kategori dan diuraikan ke dalam beberapa unit pokok-pokok permasalahan dalam rumusan masalah. Kemudian, data tersebut dianalisis untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta menyimpulkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, terdiri dari:

1. Reduksi data

Dalam penelitian tentunya akan menghasilkan data yang beragam sehingga peneliti perlu mencatat secara rinci dan teliti. Reduksi data merupakan tahapan pemilihan atau penyederhanaan data yang telah diperoleh untuk memudahkan peneliti dalam tahapan selanjutnya. Data hasil wawancara dan observasi kemudian dirangkum, tetapi jawaban dari subjek penelitian tetap utuh. Adapun data yang telah direduksi dapat memberi gambaran secara tajam terkait hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis. Data-data yang direduksi tentunya berkaitan dengan pelaksanaan manajemen bencana tanah longsor pada tahap pasca bencana dalam Destana.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap menjelaskan secara singkat dalam bentuk grafik atau bagan, diagram, tabel dan lain sebagainya pada data yang telah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini

disajikan dalam bentuk teks secara deskriptif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui hasil dalam penelitian. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen bencana tanah longsor pada tahap pasca bencana serta faktor pendukung dalam Destana menggunakan penjelasan singkat dalam bentuk narasi dan didukung oleh tabel maupun foto sebagai data pendukung.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dalam sebuah penelitian sebagai bentuk interpretasi atau memahami makna dari data yang disajikan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti bersifat sementara dan akan berkembang selama peneliti berada di lapangan dan menemukan temuan- temuan baru. Temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya merupakan kesimpulan dalam sebuah penelitian kualitatif. Pada penelitian manajemen bencana tanah longsor dalam Destana ini langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data untuk merangkum dan mengelompokkan data yang telah terkumpul untuk disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga akan mempermudah peneliti dalam tahap penarikan kesimpulan.

Istilah interpretasi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan arti dan makna yang lebih luas dan mendalam pada hasil penelitian yang

sedang dilakukan di lapangan. Pada pembahasan dan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat dari lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Sugiyono (2012: 267) menyatakan uji keabsahan data dalam penelitian lebih fokus kepada uji validitas dan reliabilitas. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas serta harus mengandung nilai kebenaran sesuai ketentuan kriteria yang dipakai sebagai syarat utama pemenuhan data serta informasi yang dikumpulkan. Hardani, dkk. (2020: 201) menjelaskan hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh informan dan narasumber yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung, sedangkan teknik yang digunakan adalah *triangulation* (triangulasi). Teknik triangulasi atau meninjau hal dari berbagai sudut pandangan yang diartikan bahwa verifikasi dari penemuan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Namun dalam teknik ini tidak hanya terbatas pada tiga sudut, dapat pula menggunakan multi-triangulasi atau boleh hanya dua sudut saja jika memang cukup dan/atau tidak memungkinkan menambah menjadi tiga sudut. Terdapat tiga jenis teknik triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknis dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2012:274):

1. Triangulasi sumber adalah menguji kualitas dan keaslian data dengan caramemeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknis, yakni menguji keabsahan data dengan mengecek

ulang data menggunakan teknik baru kepada sumber data..

3. Triangulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi sumber. Setelah mendapat data peneliti akan mengecek data dengan narasumber atau informan yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Selain itu juga membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari berbagai kalangan yang kemudian dari hasil pengecekan tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan.